
Pemberdayaan Kelompok Pengurus E-Warong Kube Pkh Harapan Jaya Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Prima Aldi Juniarto^{1*)}, Bambang Shergi Laksmo²

^{1,2}Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia
Email: ¹primaaldi@gmail.com, ²bshergi2015@gmail.com

^{*}Korespondensi: primaaldi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian pemberdayaan kelompok pengurus elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan (E-Warong KUBE PKH) Harapan Jaya Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi cukup penting dan menarik serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Teknologi dan informasi merupakan sebuah kebutuhan primer yang wajib di penuhi oleh setiap lapisan masyarakat. Dalam hal ini teknologi dan informasi telah membantu memperbaiki ekonomi, sosial serta budaya dalam tananan masyarakat kini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah *E-Government* terutama dalam program E-Warong KUBE PKH milik Kementerian Sosial. Guna menjawab permasalahan ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pengurus E-Warong KUBE PKH) Harapan Jaya Kelurahan Manggarai, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa komitmen pelaksana program, hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan program E-Warong terkait pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*). Kemudian sarana dan prasarana juga penting mengingat tanpa hal tersebut, maka pemberdayaan dan layanan program E-Warong dengan basis pemanfaatan teknologi dan informasi akan sulit berjalan. Terakhir sumber daya manusia karena pemberdayaan dan pengembangan program akan akan sulit terwujud tanpa hal tersebut.

Kata Kunci: pemberdayaan, kelompok, E-Warong KUBE PKH.

ABSTRACT

An empowerment research conducted with a group of management of mutual cooperation electronic shop business joined by Harapan Jaya Family Program (E-Warong KUBE PKH) Manggarai Village Tebet District Jakarta Selatan through information technology utilization has been an important and interesting research and possessing a well process. Information technology is an obligated primary basic human need. In this case, information technology has been supporting to escalate economy, social, and culture in today society. That has been proved by appearance of a lot of innovations run by government which one of those is E-Government especially E-Warong KUBE PKH Program owned by Ministry of Social. Due to that issue, this research is established using qualitative descriptive method. Data is collected through observation and deep interview with the management of E-Warong KUBE PKH Harapan Jaya Manggarai Village, subsequently qualitatively analyzed. The result concludes that program implementation commitment is highly important to support each process and E-Warong program activity

related to electronic public service (e-service). Further, facility and infrastructure are necessarily important due to many difficulties would arise to run the empowerment and service of E-Warong program through information technology utilization with its absence. Lastly, human resource is significant as well to actualize the empowerment and development of the program.

Keywords: *empowerment, family program participants, E-Warong KUBE PKH.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi dan informasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Selain itu, masyarakat pada masa sekarang telah terpengaruh dalam perkembangan teknologi dan informasi. Hal itu juga sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan teknologi dan informasi adalah salah satu penunjang dalam perkembangan manusia.

Teknologi dan informasi merupakan sebuah kebutuhan primer yang wajib di penuhi oleh setiap masyarakat dunia. Teknologi informasi dapat dikatakan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Kesenjangan informasi dapat ditempatkan sebagai salah satu indikator kemiskinan karena kesenjangan informasi menunjukkan ketidakmampuan mengakses dan menggunakan informasi yang akan berdampak pada kesejahteraan seseorang. Dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi telah membantu memperbaiki ekonomi, sosial serta budaya dalam

tanaman masyarakat kini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah *e-Government*.

E-Government merupakan singkatan dari *Electronic Government* yang artinya dapat dijelaskan sebagai salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, yang mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam satu sistem. Menurut Maureen Brown (dalam Mulyadi, dkk, 2018:78) Strategi pelayanan dengan konsep *e-Government* merupakan penggunaan teknologi terutama aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan layanan pemerintah kepada warga negara, rekan bisnis, pekerja, dan entitas pemerintah yang lain.

Konsep *e-Government* ditetapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini perlu mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam Negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman. Dalam hal ini tujuan pengembangan *e-Government* (dalam Main, 2010: 3) adalah (1) Untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka

meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif. (2) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

Dengan kata lain, tujuan *e-Government* adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah dan persamaan kualitas layanan yang dapat dinikmati oleh warga negara terutama terkait program-program pengentasan kemiskinan seperti program bantuan sosial.

Program bantuan sosial di Indonesia sejatinya masih membutuhkan pengembangan dan transformasi. Dengan pengembangan dan transformasi pada program jaminan serta bantuan sosial, diharapkan pengurangan angka kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar, hingga perlindungan bagi penduduk atas setiap guncangan sosial ekonomi di Indonesia dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya program untuk penanganan kemiskinan yang disinergikan, agar selanjutnya dapat memberikan dampak yang luas, efektif dan efisien. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai jenis program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana salah satu programnya adalah Program Keluarga Harapan atau yang selanjutnya disebut sebagai PKH.

PKH merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau sekarang biasa disebut sebagai keluarga pra sejahtera berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan

berbagai kewajiban yang ada di dalamnya. Walaupun PKH sudah berjalan, program tersebut dalam pelaksanaannya memiliki kendala seperti adanya penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan (Qomariah, 2012).

Badan Pemeriksa Keuangan (2013) menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan masih menemukan beberapa permasalahan seperti: (a) komitmen Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam mendukung PKH masih kurang; (b) proses validasi sasaran tidak selalu mengikuti ketentuan, sehingga hasil validasi tidak lengkap; (c) proses verifikasi atas komitmen peserta PKH terhadap Kesehatan dan pendidikan belum optimal; (d) kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) seringkali berubah sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif, dan (e) *monitoring* rutin/berkala dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum. Dengan demikian pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan program terbaru untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan atau yang selanjutnya disebut dengan e-Warung KUBE PKH.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 25 Tahun 2016 maka terbentuklah program e-Warung KUBE PKH, yang merupakan sarana yang didirikan dan dikelola secara gotong royong oleh Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet untuk tempat menjual bahan pangan pokok dengan sistem transaksi non tunai yang selanjutnya disebut dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Adapun tujuan dari E-Warung KUBE PKH yaitu untuk memastikan bahwa bantuan yang diterima masyarakat tepat sasaran, meningkatkan

kapasitas penerima manfaat untuk mengembangkan kemampuan berusaha, menyediakan sarana pelayanan transaksi keuangan secara elektronik untuk pencairan bantuan sosial, mengenalkan transaksi pelayanan perbankan kepada penerima manfaat seperti menabung, penggunaan kartu elektronik untuk transaksi pembayaran dan tarik tunai, sebagai tempat menampung dari memasarkan hasil produksi masyarakat sekitar terutama penerima manfaat, dan menyediakan bahan pangan pokok sehari-hari dengan harga terjangkau bagi penerima manfaat bantuan sosial yaitu KPM PKH dan BPNT (Bappenas: 2017).

TINJAUAN TEORITIS

Pemberdayaan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dalam konsep *e-Government* sama sekali tidak dimaksudkan sebagai alternatif pengganti dari sistem pelayanan publik yang sudah ada, melainkan hanya bersifat supplemen/terhadap dan komplementer/pelengkap kepada sistem pelayanan publik yang ada, yang telah dibangun selama bertahun-tahun dengan akar tradisi dan metode yang telah baku, sesuai dengan ketentuannya sendiri. Pemberdayaan berbasis teknologi dan informasi berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai sarana penunjang sistem pelayanan publik, khususnya untuk meningkatkan kapasitas layanan, untuk memperbesar peluang akses ke berbagai pusat informasi dan memperbesar peluang masyarakat untuk mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga layanan dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis.

Ife (2013) melihat pemberdayaan secara ringkas sebagai upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung. Beberapa kelompok yang disebut kurang beruntung terkait dengan kelas, ras, gender, lansia, anak dan remaja, penyandang cacat, dan mereka yang terisolasi, serta

mereka yang mengalami kesedihan dan kehilangan karena ditinggal orang yang dicintai, ataupun mereka yang memiliki masalah keluarga dan pribadi.

Ife (2013) mempertimbangkan tujuh jenis daya yang bisa terlibat dalam strategi pemberdayaan berbasis komunitas, yang mungkin terdapat beberapa tumpang tindih dan memiliki interaksi kompleks pada tiap jenisnya: (1) Daya untuk membuat pilihan personal dan menentukan kesempatan hidup; (2) Daya untuk mendefinisikan kebutuhan, kemampuan individu untuk mendefinisikan apa saja kebutuhan mereka; (3) Daya untuk berpikir, upaya untuk mengekspresikan ide dalam forum publik, kapasitas individu untuk masuk dalam dialog, dan mengkontribusikan ide; (4) Daya untuk memanfaatkan institusi, untuk memiliki aksesibilitas terhadap layanan edukasi, kesehatan, keluarga, dan sebagainya; (5) Daya untuk memaksimalkan akses dan sumberdaya, termasuk finansial dan non moneteris seperti edukasi, kesempatan untuk berkembang, rekreasi, dan pengalaman budaya; (6) Daya untuk terlibat dalam ekonomi, yang mana memiliki daya dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mengakses, menggunakan mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran; Dan (7) Daya untuk mengontrol reproduksi, tidak hanya berbicara tentang kelahiran dan pemeliharaan anak, tapi juga membahas daya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada anak.

METODOLOGI PENELITIAN

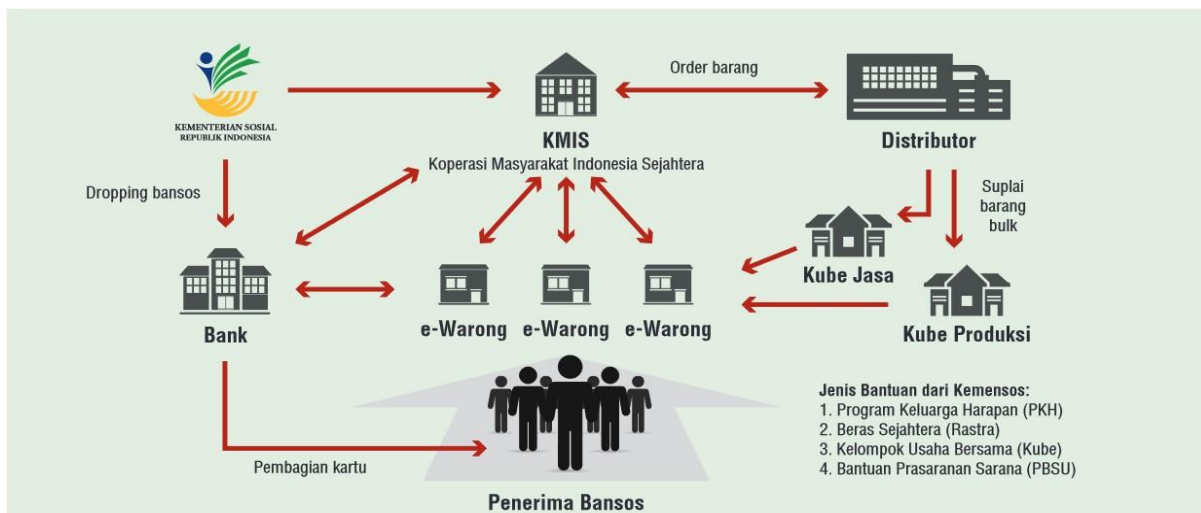
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Neuman (2014) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan penelitian. Terkait hal tersebut, jenis penelitian deskriptif akan menggambarkan situasi,

penataan sosial serta hubungan dari tujuan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik yang sesuai untuk kondisi yang sangat informatif yang dinamakan *purposive sampling*. Adapun *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan dalam situasi dengan kemampuan untuk menentukan informan sesuai pada tujuan yang sudah dipikirkan (Neuman, 2014). Dalam penelitian ini, informan yang akan digunakan sebagai sumber data utama adalah informan yang mampu memberikan informasi mengenai tema yang diangkat. Informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai adalah pengurus Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) Harapan Jaya Kelurahan Manggarai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan pencapaian tujuan program E-Warong KUBE PKH tergantung bagaimana program tersebut dilakukan utamanya terhadap pemberdayaan pengelola/pengurus e-Warong. Zastrow dalam Sariningsih & Sari (2017) mengemukakan bahwa tujuan dari E-Warong KUBE PKH adalah untuk mencapai pemberdayaan ekonomi anggotanya dengan meningkatnya kemampuan dalam memanfaatkan sumber dan kekuatan yang dimilikinya, dan juga menitikberatkan pada peningkatan jiwa kewirausahaan sehingga mampu memberdayakan diri sendiri dan keluarganya. Pemberdayaan meliputi meningkatnya kemampuan individu, keluarga, kelompok dan komunitas dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Coulter, 2000). Keberdayaan bukan berarti mengambil keputusan sendiri, tetapi hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan E-Warong KUBE PKH sebagai suatu kelompok (Sariningsih & Sari, 2017).



Gambar 1. Pola Hubungan E-Warong KUBE PKH Dengan Penerima Manfaat

Sumber: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, 2016.

Berkaitan dengan gambar 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa program E-Warong KUBE PKH

yang digunakan sebagai tempat menjual bahan pangan pokok dengan sistem transaksi non tunai BPNT ini dilekola langsung oleh masyarakat yang

menerima bantuan sosial itu sendiri yang dinamakan KUBE Jasa sebagai pengelola atau biasa disebut pengurus E-Warong dengan maksimal kepengurusan 10 orang anggota. Selanjutnya anggota KUBE jasa atau pengurus E-Warong secara individual menjadi anggota Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS). Untuk mengakses bantuan ini, KPM mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai sarana untuk mencairkan bantuan (Raemon, Marhadi: 2017).

Proses pembentukan E-Warong KUBE PKH di Jakarta Selatan ini dimulai sejak tahun 2017, dengan jumlah anggota 10 orang per kelompok. Setiap kelompok memperoleh bantuan sebesar Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Untuk mendukung kelancaran kegiatan, penyelenggara program menugaskan tenaga pendamping yang berasal dari pendamping PKH. Jenis-jenis daya yang bisa terlibat dalam strategi pemberdayaan berbasis komunitas menurut Ife (2013) dapat terlihat dari proses pembentukan pengurus yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pra Kondisi

Keanggotaan pengurus E-Warong KUBE PKH ini tidak terlepas dari statusnya sebagai peserta PKH dan BPNT. Artinya anggota E-Warong KUBE PKH berasal dari peserta program komplementaritas yang sedang mengalami proses transisi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa E-Warong KUBE PKH juga merupakan program komplementaritas dari Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa antara program tersebut baik E-Warong KUBE PKH, BPNT dan PKH terdapat kesinambungan, baik secara substantif maupun teknis.

b. Pembentukan Kelompok

Kategori kelompok pengurus E-Warong KUBE PKH terbentuk bersamaan dengan terpilihnya sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi peserta PKH dan BPNT. Secara otomatis sejumlah KPM yang memiliki ketertarikan dalam program ini dikumpulkan menjadi satu kelompok pengurus E-Warong KUBE PKH. Kemudian anggota kelompok ini dibagi dalam beberapa kepengurusan sesuai dengan kebutuhan program E-Warong KUBE PKH atas dasar berbagai pertimbangan. Misalnya untuk efektivitas dan efisiensi proses pemberdayaan kelompok dalam program E-Warong KUBE PKH. Dapat dikatakan bahwa inisiatif pembentukan kelompok ini ada pada penyelenggara dan atau pelaksana program. Kelompok ini dibentuk untuk menjadi kepengurusan dalam program E-Warong KUBE PKH untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dalam program Bantuan Pangan Non Tunai. Secara konseptual jika dipandang secara makro, proses pembentukan kelompok ini berlangsung dalam kendali penyelenggara program E-Warong KUBE PKH yang setiap saat hadir di tengah kelompok yang disebut penyelia E-Warong sebagai ujung tombak proses pemberdayaan program.

Secara mikro proses pembentukan kelompok ini terbentuk dari penyesuaian diri sesama KPM yang memiliki satu visi dan misi sosial diantara mereka dalam melaksanakan program E-Warong KUBE PKH. Mereka bersedia masuk dalam kepengurusan atas dasar ketertarikan dalam penilaian masing-masing anggota, dengan kriteria masing-masing anggota, terutama berdasarkan kesamaan visi dan misi masing-masing. Ketika interaksi sosial dijalani, sebagai sesama pengurus mereka saling mengenal, saling menilai, saling memahami, bahkan saling menguji konsep, visi dan misi masing-masing anggota terutama dalam forum pertemuan kelompok pengurus E-Warong KUBE PKH.

Dapat dikatakan bahwa KPM yang kemudian menjadi anggota pengurus E-Warong KUBE PKH sedikit banyak sudah mempunyai modal kemandirian dan kebersamaan. Modal ini sejak awal sudah terbentuk sejak keinginannya masuk dalam kepesertaannya menjadi pengurus E-Warong KUBE PKH.

Inti dari pembentukan kelompok menjadi sebuah kepengurusan E-Warong KUBE PKH dalam proses pemberdayaannya menegaskan bahwa pemilihan pengurus E-Warong KUBE PKH merupakan hasil dari rangkaian proses yang dibangun sejak tahun 2017 ketika mereka mulai tergabung menjadi peserta program komplementaritas. Proses ini dapat dikatakan sebagai proses sosial dalam arti luas yang meliputi dinamika interaksi sosial dan dinamika psikologis yang terarah pada proses pemberdayaan.

c. Pembuatan Proposal dan Nomor Rekening

Pembuatan proposal disusun oleh penyelia atas dasar aspirasi anggota dalam forum diskusi yang melibatkan anggota dan pengurus E-Warong KUBE PKH. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses ini di tempuh atas dasar saling percaya. Mereka dengan jujur minta tolong karena mereka tidak mempunyai ketrampilan mengetik, apalagi jika dikaitkan dengan aspek teknis penyusunan proposal sebagaimana petunjuk yang ada.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan pembuatan nomor rekening KUBE PKH, rekening ini dibuat oleh penyelia bersama pengurus E-Warong KUBE PKH. Sejalan dengan hal ini, maka pencairan uang dari rekening juga harus dilakukan secara bersama antara pengurus dan penyelia E-Warong KUBE PKH. Proposal yang telah tersusun, kembali dibahas dalam pertemuan kelompok E-Warong KUBE PKH untuk selanjutnya disahkan, dan bersama nomor rekening dan dikirimkan ke penyelenggara program di Kementerian Sosial.

Pengiriman dilakukan melalui Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Dinas Sosial DKI Jakarta, lalu ke Kementerian Sosial Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Setelah proposal diverifikasi oleh pihak penyelenggara di Kementerian Sosial, akhirnya bantuan modal usaha ditansfer ke rekening E-Warong KUBE PKH sebesar 20 juta rupiah. Uang ini menjadi modal bagi E-Warong KUBE PKH dalam proses pembangunan dan perkembangan lokasi E-Warong serta pemberdayaan bagi program E-Warong KUBE PKH.

Program E-Warong merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi dan informasi dalam *E-Government* yang merupakan hasil Kerjasama Kemensos dengan bank pelaksana yakni Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) untuk mendistribusikan bansos PKH secara non tunai. KMIS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk pelaksanaan E-Warong (Raemon dan Marhadi: 2017). Koperasi ini merupakan koperasi primer yang mengatur mekanisme pemasokan barang (dari Bulog atau *supplier* lainnya) kepada E-Warong. Untuk 5 kota di Provinsi DKI Jakarta, Bank yang telah bekerjasama dengan e-Warong adalah Bank BNI ditambah Bank BRI bagi Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian, Kemensos dan Dinas Sosial (Dinsos) beserta Suku Dinas Sosial (Sudinsos) juga telah melakukan kerjasama dengan KMIS, Pendamping sosial dan KUBE jasa atau pengurus e-Warong. Dalam melakukan transaksi, KPM yang dapat mencairkan dana tersebut adalah mereka yang telah memiliki KKS (ATM BNI dan BRI).

Berkaitan dengan program E-Warong KUBE PKH dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi dan informasi, Program BPNT yang merupakan bagian dari program komplementer Kemensos adalah program bantuan

pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif (Pedoman Umum BPNT: 2019). Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya (Pedoman Umum Program Sembako: 2020).

Adapun setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 150.000 yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, tepung, daging ayam, minyak goreng dan lain lain, melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Dalam Kartu KKS elektronik tersebut, terdapat sistem *Saving account* dan *e-Wallet*/dompet elektronik, sehingga KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila

dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Prinsip dari program BPNT dalam program e-Warong KUBE PKH adalah mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan preferensi Pentunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai dalam membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga KPM dan pendapatan keluarga (Juknis BPNT 2016: 6). Penyaluran BPNT yang dilakukan oleh Pengurus e-Warong KUBE PKH dikelola secara berkelompok dengan 10 orang anggota yang tergabung dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terverifikasi sebagai penerima bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan serta telah memiliki kartu kombo.

Dana bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya ditampung dalam rekening E-Warong KUBE PKH, disepakati menjadi milik bersama untuk dijadikan modal awal membentuk E-Warong KUBE PKH bagi semua anggota E-Warong. Selanjutnya modal tersebut digunakan untuk pelatihan dalam proses pengelolaan E-Warong KUBE PKH dan untuk membangun lokasi E-Warong di rumah pengurus yang dijadikan lokasi serta pembelian etalase dan pengadaan supplier. Pencairan modal awal ini dilakukan oleh masing-masing anggota dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai dengan diketahui penyelenggara program serta penyelia. Isi surat menegaskan kesiapan pengurus dalam pengelolaan dan pemberdayaan E-Warong KUBE PKH. Proses ini menggambarkan komitmen dan keseriusan pengurus E-Warong KUBE PKH atas pertanggungjawaban uang bantuan ini.

Usaha dimulai dengan belanja peralatan yang dibutuhkan E-Warong KUBE PKH.

Selanjutnya mereka menjalankan E-Warong KUBE PKH secara rutin dari hari ke hari setiap bulannya sambil tetap berusaha mencari kegiatan lain yang sifatnya menghasilkan uang. Bagi mereka yang melanjutkan usaha yang sudah ada, mereka melakukan pengembangan usaha. Pengembangan dilakukan secara fleksibel dan bergantian.

Terkait manajemen E-Warong KUBE PKH, proses pembukuan E-Warong KUBE PKH dirasa sangat penting dalam kaitannya dengan pemberdayaan kelompok dalam menjalankan E-Warong KUBE PKH. Pengadministrasian dimulai dengan menyediakan sejumlah buku yang dibutuhkan dalam proses administrasi seperti buku kas, buku anggota dan buku tamu. Proses pembuatan buku ini dikerjakan oleh penyelia, sementara pengisiannya dilakukan secara bersama oleh pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara).

Pengisian dilakukan dalam bentuk pencatatan secara manual segala kewajiban anggota ke buku anggota. Kewajiban dimaksud terdiri dari iuran atau simpanan wajib, simpanan sukarela, cicilan pinjaman, dan iuran kesejahteraan sosial. Selanjutnya pencatatan yang sama dilakukan dalam buku kas/buku induk E-Warong KUBE PKH. Pencatatan ini dilakukan sekaligus untuk mencocokkan catatan yang ada dalam buku anggota dengan buku kas.

Terkait berfungsian Pengurusnya, secara umum kepengurusan KUBE terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kepengurusan E-Warong KUBE PKH, pengurus berusaha membagi tugas secara merata hingga melibatkan semua anggota sesuai kemampuan masing-masing. Sesama pengurus terlihat kompak bekerjasama dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan E-Warong KUBE PKH, baik dalam kegiatan internal maupun eksternal. Secara internal, pengurus aktif berkomunikasi dengan anggota menginformasikan berbagai hal yang terkait dengan E-Warong KUBE

PKH, sementara secara eksternal pengurus membina relasi dengan berbagai pihak terkait seperti para supplier untuk mencari peluang pengembangan usaha E-Warong KUBE PKH yang dapat meningkatkan eksistensi E-Warong KUBE PKH Harapan Jaya di Kelurahan Manggarai.

Adapun dalam partisipasi anggota terhadap manajemen E-Warong KUBE PKH dapat dikategorikan atas 2, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah partisipasi yang dilakukan pengurus dengan mengambil inisiatif untuk memulai terlibat dalam kegiatan E-Warong KUBE PKH tanpa menunggu instruksi atau perintah dari pengurus lain. Sementara partisipasi pasif adalah partisipasi yang dilakukan anggota dengan menunggu perintah pengurus E-Warong KUBE PKH terlebih dahulu. Adapun dalam proses partisipasi dan pelaksanaan kepengurusan e-Warong KUBE PKH Harapan Jaya berjalan sejak 2017 hingga saat ini, perempuan menjadi pokok bagi keberlangsungan program tersebut. Sejauh ini, keberadaan program e-Warong KUBE PKH dinilai telah membantu KPM maupun pengurus e-Warong KUBE PKH mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Dengan berbagai tantangan yang ada, pengurus e-Warong KUBE PKH yang mayoritas adalah perempuan dituntut untuk dapat mempertahankan eksistensi e-Warong ditengah perkembangan zaman dan persaingan harga bahan makanan pokok yang tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pemberdayaan kelompok pengurus elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan (E-Warong KUBE PKH) Harapan Jaya Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan melalui pemnafaatan teknnologi dan informasi cukup penting dan menarik serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, hal tersebut harus didukung dengan beberapa hal yaitu (1) komitmen

pelaksana program, hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan program E-Warong terkait pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*). Hal tersebut karena pelaksana program/penyelenggara maupun pelaksana layanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan publik yang prima dengan menerapkan *e-government*; (2) sarana dan prasarana mengingat dukungan sarana dan prasarana juga menjadi penting karena tanpa hal tersebut, maka pemberdayaan dan layanan program E-Warong dengan berbasis pemanfaatan teknologi

dan informasi akan sulit berjalan. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah ketersediaan perangkat elektronik/smartphone, jaringan internet, dan sebagainya; (3) sumber daya manusia karena apabila komitmen pemimpin dan sarana prasarana sudah memadai, namun sumber daya manusia/pengurus yang ingin mengembangkan program E-Warong tidak memadai atau tidak memiliki ketertarikan dalam pemberdayaan dan pengembangan program maka hal tersebut akan sulit terwujud.

BPK. (2013). Efektifitas Program Keluarga Harapan (dalam jaringan)

DAFTAR PUSTAKA

Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis, and Practice*. Australia: Cambridge University Press.

Mulyadi, dkk. (2018). *Aministrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Main, Abdul. 2010. *e-Government: Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Balai Diklat Keagamaan.

Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edinburgh Gate, England: Pearson Education Limited.

Qomariah. (2012). Program Keluarga Harapan Studi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayan. Medan. *FISIP USU: Ilmu Administrasi Negara*.

Raemon & marhadi, A. (2017) Potensi Pengembangan Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kube Pkh Sebagai Alternatif Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Etnoreflika Volume 6 Nomor 2*. 107 – 116.

Zastrow, Charles. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare*. Canada: Nelson Education.

<https://www.bpk.go.id/news/efektivitas-program-keluarga-harapan> (diakses 26 maret 2021).